

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERNYATAAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi	
ABSTRACT	ix	
ABSTRAKSI	x	
DAFTAR ISI	xi	
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL	xiii	
DAFTAR SINGKATAN	xiv	
BAB I - PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Rumusan Masalah	4	
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4	
1.4 Kerangka Konseptual	5	
1.5 Argumen Utama	5	
1.6 Metode Penelitian		
1.6.1 Jenis Penelitian	7	
1.6.2 Jangkuan Penelitian	7	
1.6.3 Pengumpulan Data	7	
1.6.4 Analisis Data	7	
1.7 Sistematika Penulisan	8	
BAB II – PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DI INDONESIA DAN AUSTRALIA		10
2.1 Pengertian <i>Transnational Organised Crime</i>	10	
2.2 Perkembangan <i>Transnational Crime</i> di Indonesia	15	
2.3 Isu Penyelundupan Manusia atau <i>People Smuggling</i> di Indonesia	18	
2.4 Perkembangan <i>Transnational Crime</i> di Australia	22	
2.5 Isu Penyelundupan Manusia atau <i>People Smuggling</i> di Australia	23	

BAB III – *MULTI-TRACK DIPLOMACY* DALAM UPAYA MENGATASI

PENYELINDUPAN MANUSIA	32
3.1 Track Pertama: Diplomasi oleh Pemerintah	32
3.1.1 Meningkatkan Kerjasama Bilateral	33
a. Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia	34
b. Kerjasama antara Polisi Federal Australia dan Kepolisian Republik Indonesia	35
c. Kerjasama antara Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia	38
3.1.2 Kerjasama Multilateral	39
a. The Bali Process	40
3.1.3 Alasan Penerapan Jalur Pemerintah	43
3.2 Track Kedua: Non-Pemerintah	44
3.2.1 Alasan Penerapan Jalur Non-Pemerintah	47
3.3 Track Kelima: Akademisi	48
3.3.1 Alasan Akademisi	50
3.4 Track Kedelapan: Finansial atau Pendanaan	51
3.4.1 Alasan Penerapan Jalur Pendanaan atau Finansial	53
3.5 Track Kesembilan: Komunikasi dan Media	54
3.5.1 Alasan Penerapan Jalur Media	56
3.6 Sinergitas Antar <i>Multi-Track Diplomacy</i>	57

BAB IV – TANTANGAN *MULTI-TRACK DIPLOMACY* DALAM UPAYA

MENGATASI PENYELUNDUPAN MANUSIA	60
4.1 Tantangan Jalur Pemerintah	60
4.2 Tantangan Jalur Non-Pemerintah	62
4.3 Tantangan Jalur Akademisi	63
4.4 Tantangan Jalur Finansial atau Pendanaan	64
4.5 Tantangan Jalur Komunikasi dan Media	65

BAB V – KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

GRAFIK

Grafik II. 1	Penyelundupan Manusia di Australia tahun 1999 – 2012	26
Grafik III.1	Sinergitas Antar Multi-Track Diplomacy dalam Upaya Mengatasi Penyelundupan Manusia	58

TABEL

Tabel IV.1	Implementasi dan Tantangan Multi-Track Diplomacy dalam Upaya Mengatasi Penyelundupan Manusia	67
------------	---	----

DAFTAR SINGKATAN

ABC	Australian Broadcasting Corporation
ABK	Anak Buah Kapal
ACC	Australian Crime Commission
AFP	Australian Federal Police
AIJP	Australia Indonesia Partnership for Justice
ARTIP	Asia Regional Trafficking in Persons
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEAN-PACTC	ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime
AUD	Australian Dollar
AusAID	Australian Agency for International Aid
BRMC	Bali Ministerial Conference
CILIS	Centre for Indonesian Law, Islam and Society
CSCAP	Council for Security Cooperation in the Asia Pacific
DIAC	Department of Immigration and Citizenship
HAM	Hak Asasi Manusia
IMA	Irregular Maritime Arrivals
IOM	International Organisation for Migration
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MOU	Memorandum of Understanding
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM	Perdana Menteri
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
RCF	Regional Cooperation Framework
RCP	Regional Consultative Process
RI	Republik Indonesia
RILC	Refugee and Immigration Legal Centre
RSO	Regional Support Office
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
Sespim	Sekolah Staf dan Pimpinan
SIEV	Suspected Illegal Entry Vessels
SOS	Save Our Souls

Tentara Nasional Indonesia

TOC Transnational Organised Crime

UNCATOC United Nations Conventions Against Transnational Organised Crime

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office of Drugs and Crime

WNI Warga Negara Indonesia